



ANALISIS CO-PRODUCTION DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK DANAU OPI PALEMBANG: KETERLIBATAN MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN PELAKU LOKAL

Sandia Pratama¹, Pramudya Wulandari², Aulia Salsabila³, Jeni Aprianti⁴, Siti Nuraziza⁵.

¹Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

²Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

³Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

⁴Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

⁵Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 11, 05, 2025

Revised 12, 07, 2025

Accepted 02, 02, 2026

Kata Kunci:

Ruang Publik

Co-Production

Danau OPI

Pengelolaan

ABSTRAK

Ruang publik merupakan fasilitas penting yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor melalui mekanisme *Co-production*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ruang publik, tingkat partisipasi masyarakat, peran aktor kunci, serta model *Co-production* ideal pada pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan pengunjung, pedagang, serta petugas parkir. Instrumen disusun berdasarkan teori *Co-Production* Ostrom serta pengembangan dari Brandsen & Pestoff, meliputi empat dimensi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dasar di Danau OPI cukup tersedia, tetapi belum optimal karena masih terdapat masalah kebersihan, minimnya penerangan, tidak adanya area bermain, dan belum tertatanya pedagang. Partisipasi masyarakat berjalan secara informal dan sporadis, tanpa wadah kolaboratif yang terstruktur. Pemerintah berperan dalam pembangunan fisik, namun masih lemah pada aspek regulasi dan pemeliharaan, sementara keterlibatan swasta hampir tidak terlihat. Penelitian menyimpulkan perlunya model *Co-production* yang lebih sistematis melalui forum komunikasi, regulasi pedagang, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, serta swasta untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Sandia Pratama

Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Indonesia

Email: sandiaprtm@gmail.com

PENDAHULUAN

Ruang publik merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan kota karena menyediakan tempat bagi interaksi sosial, aktivitas ekonomi, rekreasi, serta pembentukan identitas warga (Qi, *et al.*, 2024). Keberadaan ruang publik yang dikelola secara baik terbukti berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat urban, mendorong kohesi sosial, dan memperkuat keterlibatan warga dalam tata kelola kota (Supriyanto, *et al.*, 2023). Di tengah laju urbanisasi yang pesat, tantangan pengelolaan ruang publik semakin kompleks karena melibatkan beragam aktor, kepentingan, dan dinamika sosial yang saling berinteraksi. Perencanaan kota berkelanjutan, ruang publik juga dipahami sebagai instrumen strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan fisik kota dengan aspek sosial dan lingkungan (Kuta, 2025).

Dalam konteks tersebut, konsep *Co-production* muncul sebagai pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk ruang publik. Gagasan *Co-production* pertama kali dikenalkan oleh (Ostrom, 1996), yang menekankan bahwa pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya efektif jika hanya bertumpu pada pemerintah. Menurut Ostrom, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, dan aktor non-pemerintah merupakan kunci keberhasilan pelayanan publik. Pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut oleh (Brandsen & Pestoff, 2008), yang membagi *Co-production* ke dalam tiga proses utama: *Co-design* (perancangan bersama), *Co-delivery* (pelaksanaan bersama), dan *Co-assessment* (evaluasi bersama). Di Indonesia, *Co-production* juga sering melibatkan aktor non-negara berbasis komunitas dan kewirausahaan sosial yang berperan aktif dalam penyediaan layanan publik (Sukmayeti & Utami, 2018).

Seiring berkembangnya teori administrasi publik, kontribusi aktor non-negara dalam pelayanan publik semakin dianggap sebagai bagian integral dari *governance modern* (Lowndes, *et al.*, 2006). Dalam pengelolaan ruang publik, *Co-production* memungkinkan peran berbagi yang lebih jelas antara pemerintah sebagai penyedia regulasi dan infrastruktur dasar, masyarakat sebagai pengguna dan penjaga keberlanjutan, serta pihak swasta sebagai pendukung fasilitas, pendanaan, atau program CSR (Verschuere, *et al.*, 2012). Kolaborasi tersebut tidak hanya mengurangi beban pemerintah, tetapi juga meningkatkan relevansi pengelolaan ruang publik terhadap kebutuhan warga.

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas ruang publiknya. Salah satu ruang publik yang cukup populer adalah Ruang Publik Danau OPI, yang berfungsi sebagai area rekreasi, olahraga, ekonomi kreatif, dan ruang sosial bagi warga. Namun, seperti banyak ruang publik lainnya, Danau OPI menghadapi tantangan dalam aspek kebersihan, perawatan fasilitas, keamanan, keteraturan aktivitas informal, serta keterlibatan aktor dalam pemeliharannya. Tantangan tersebut sering kali berkaitan dengan minimnya pembagian peran yang jelas antara warga, komunitas lokal, pemerintah, dan pihak swasta (Gehl & Svarre, 2013). Kondisi serupa juga ditemukan dalam pengelolaan ruang wisata dan ruang terbuka di Kota Palembang yang masih menghadapi persoalan tata kelola dan optimalisasi fungsi ruang (Yulianti & Junaidi, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ruang publik yang dikelola melalui pendekatan *Co-production* memiliki tingkat keberlanjutan lebih baik, tingkat vandalisme lebih rendah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas (Ling & Fahmi, 2020). Dengan

demikian, penting untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur *Co-production* telah berjalan dalam pengelolaan Danau OPI, terutama dalam hal kondisi fasilitas, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah dan swasta, serta pola kolaborasi antar-aktor.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Co-production* dalam pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang. Instrumen penelitian dibangun berdasarkan empat dimensi utama yang merujuk pada kerangka teori (Ostrom, 1996), (Brandsen & Pestoff, 2006), serta penguatan dari (Brandsen, *et al.*, 2018), yaitu: (1) kondisi ruang publik, (2) partisipasi masyarakat, (3) peran aktor kunci (pemerintah & swasta), dan (4) model *Co-production* ideal.

Kajian ini penting secara akademik karena memberikan kontribusi terhadap literatur *Co-production* dalam konteks ruang publik Indonesia yang masih minim diteliti. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palembang maupun pengelola kawasan OPI agar dapat merumuskan kebijakan kolaboratif yang berkelanjutan, responsif, dan partisipatif. Dengan memahami dinamika kerjasama antar-aktor, pengelolaan ruang publik dapat menjadi lebih efektif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang menggunakannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan di Ruang Publik Danau OPI Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam, eksploratif, dan interpretatif berdasarkan perspektif aktor yang terlibat (Suryandari, 2019). Unit analisis penelitian adalah pengelolaan ruang publik, sedangkan unit observasi mencakup pengguna ruang publik, pedagang, serta petugas parkir yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan beberapa pengunjung, pedagang, dan petugas parkir. Instrumen observasi disusun berdasarkan teori *Co-Production* dari (Ostrom, 1996), (Brandsen & Pestoff, 2006), serta (Brandsen, *et al.*, 2018), yang mencakup empat dimensi: (1) kondisi ruang publik, (2) partisipasi masyarakat, (3) peran pemerintah dan swasta, dan (4) model *Co-production* ideal. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, seperti foto kondisi fasilitas, catatan lapangan, serta literatur pendukung mengenai pengelolaan ruang publik dan *Co-production*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik menggunakan *software atlas.ti*, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan observasi dan wawancara dikelompokkan berdasarkan empat dimensi *Co-production* untuk melihat pola keterlibatan aktor dalam pengelolaan Danau OPI. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori untuk menilai sejauh mana praktik *Co-production* telah berjalan dan aspek apa yang masih perlu diperbaiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ruang Publik di Danau OPI Palembang

Ruang publik di Danau OPI Palembang menunjukkan *respons* yang unik dan dinamis terhadap penggunaan, keterbatasan, dan harapan-harapan berbeda dari para pengunjung dan pengguna lainnya. Berdasarkan wawancara, sebagian besar responden menunjukkan bahwa fasilitas dasar seperti jalur *jogging*, tempat duduk, area parkir, dan aksesibilitas sudah disediakan dengan baik dan dapat digunakan. Seorang pengunjung menyebutkan bahwa jalur *jogging* itu “bagus” dan tempat duduk “terasa nyaman”, menunjukkan bahwa ruang publik mampu memenuhi fungsi rekreasi yang paling dasar. Sentimen serupa juga dibagikan oleh pengunjung lain yang menghargai ruang tersebut sebagai ramah keluarga, dengan fasilitas untuk akses penyandang disabilitas, dan keamanan

yang wajar dari ancaman kriminal, seperti pencopet.

Layanan parkir yang tersedia juga dihargai sebagai memadai. Petugas parkir menyatakan bahwa area parkir itu “cukup untuk digunakan setiap hari”, meskipun ada lonjakan pengunjung pada akhir pekan. Biaya parkir sebesar Rp2.000 dianggap wajar, dan tidak ada keluhan. Bahkan, beberapa pengunjung mengungkapkan kepuasan terhadap layanan parkir, memuji sikap ramah para petugas. Petugas juga memberikan keamanan parkir dan mengklaim bahwa tidak pernah ada pencurian kendaraan, yang menambah keseluruhan keamanan bahwa area parkir itu aman.

Di balik masih ketersediaan fasilitas dasar di Danau OPI, ada beberapa catatan kritis yang muncul dari masyarakat. Salah satu pedagang di kawasan Danau OPI berpendapat, wisata ini masih “belum jelas tempat wisatanya, bisa dibilang belum jadi.” Alhasil, para pedagang pun merasakan ketidakpastian ruang dan memilih untuk berjualan di pinggir, keseberang pinggir parkir, dan secara informal. Ketidakteraturan ini seolah menyatakan belum adanya harmonisasi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan pengelolaan ruang publik. Hal ini seolah mengisi dan mengedepankan teori *Co-production*, di mana peran masyarakat seharusnya bisa diakomodir. Pembangunan sinergis dengan pemerintah akan menciptakan layanan publik yang berbalas.

Permasalahan lain yang juga mencolok adalah kebersihan dan lingkungan. Salah satu pengunjung mengaku, meski tempat sampah ada, “sampah masih berserakan.” Hal ini menyatakan dua persoalan sekaligus: pengelolaan kebersihan yang lemah dan partisipasi pengunjung yang tidak untuk menjaga. Ditambah, area ini juga akan terasa panas dan kurang teduh bila tidak ada pohon dan vegetasi lain. Maka, beberapa responden menyatakan adanya usulan “penanaman pohon” agar ruang publik lebih sejuk dan nyaman.

Dari sisi infrastruktur pendukung, beberapa kekurangan masih signifikan.

Petugas parkir menyoroti penerangan yang belum merata, di mana “lampu hidup cuma di depan dan belakang, sedangkan di taman malah tidak hidup”. Hal ini mengurangi rasa aman pada malam hari. Sementara itu, pengunjung menyoroti ketiadaan kantin makanan dan area bermain anak. Akibatnya, fungsi sosial ruang publik masih terbatas dan belum sepenuhnya mendorong interaksi komunitas sebagaimana idealnya ruang publik yang inklusif.

Secara keseluruhan, kondisi ruang publik di Danau OPI dapat disimpulkan cukup memadai dari segi hal dasar tetapi ini juga belum cukup optimal. Fasilitas dasar memang tersedia dan mampu mendukung fungsi rekreatif, namun kelemahan dalam hal kebersihan, penataan pedagang, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya fasilitas tambahan membuat ruang publik ini belum mampu memberikan pengalaman yang ideal bagi pengunjung. Padahal, studi mengenai ruang publik di Palembang menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas ramah anak dan keluarga berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial di ruang terbuka (Rahmiati & Prihastomo, 2018). Menurut kerangka *Co-production*, situasi ini menunjukkan adanya celah pada dimensi *Co-design* dan *Co-delivery*. Ruang publik dibangun oleh pemerintah, tetapi masyarakat (pengunjung, pedagang, pengelola parkir) belum sepenuhnya dilibatkan dalam merancang dan mengembangkan fasilitas. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara apa yang sudah tersedia dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Publik Danau OPI

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam teori *Co-production* menurut (Brandsen & Pestoff, 2006), yang menyatakan bahwa layanan publik harus melibatkan masyarakat yang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, dan tidak bisa bergantung hanya kepada Negara. Dalam konteks ruang publik, idealnya masyarakat berperan serta melalui kegiatan

pemeliharaan, kebersihan, pengawasan, penyelenggaraan aktivitas, dan perencanaan bersama yang kolaboratif. Namun, hasil temuan di Danau OPI menjelaskan bahwa masyarakat hanya dengan partisipasi minimal dan kurang terencana. Padahal, ruang publik memiliki potensi besar sebagai medium untuk mendorong partisipasi warga, tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga dalam pengambilan keputusan publik (Sari, *et al.*, 2021).

Beberapa pengunjung mengaku tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan gotong royong atau pemeliharaan kebersihan di lingkungan Danau OPI. Mereka memang mengapresiasi keberadaan tempat sampah, namun kenyataannya sampah masih sering berserakan di sekitaran Danau. Hal ini menegaskan lemahnya partisipasi *Co-delivery*, di mana masyarakat seharusnya ikut terlibat dalam menjaga layanan publik. Ketidakpedulian ini menandakan lemahnya kolaborasi dan koordinasi antara pengunjung dengan pengelola.

Dari sisi pedagang, keterlibatan mereka di ruang publik lebih bersifat adaptif dan informal. Para pedagang mengemukakan bahwa mereka harus berjualan secara berpindah-pindah, karena belum ada lokasi tetap yang disediakan. Mereka “saling ngerti saja” dengan sesama pedagang untuk tidak mengganggu lalu lintas, namun belum ada wadah resmi yang melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka *Co-production*, ini menjadi peluang kosong karena pedagang tetap berpotensi menjadi salah satu aktor dalam *Co-design* (perencanaan bersama) jika pemerintah bersedia memfasilitasi.

Untuk kategori tukang parkir, ada bentuk partisipasi yang lebih jelas. Selain menjaga kendaraan, mereka juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik. Dalam hal ini, jumlah mereka ada empat petugas yang bertugas secara aktif mengelola perparkiran dan menghalau kemacetan di area parkir. Meskipun tidak ada peran ini secara formal dalam struktur kelembagaan pemerintah, keberadaan tukang parkir secara langsung berkontribusi dalam *Co-production* karena

mereka memberikan layanan publik yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh pengunjung.

Kendati demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan jangka panjang Danau OPI masih minim. Sebagian pengunjung memang menyampaikan harapan adanya penambahan pohon, kantin, atau area bermain, namun aspirasi ini lebih bersifat individual dan belum terhimpun dalam suatu mekanisme kolektif. Tidak ditemukan adanya forum komunikasi atau komunitas warga yang secara konsisten menyuarakan aspirasi terkait pengelolaan Danau OPI. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi *Co-assessment* (evaluasi bersama) belum berjalan optimal, karena suara masyarakat tidak tersalurkan secara sistematis ke dalam kebijakan pengelolaan.

Kondisi di Danau OPI menggambarkan kesenjangan antara potensi partisipasi dan realisasi partisipasi masyarakat. Potensi tersebut terlihat dari kehadiran pedagang, tukang parkir, maupun aspirasi pengunjung, tetapi tanpa wadah kelembagaan, keterlibatan mereka hanya bersifat individual dan sporadis. Agar prinsip *Co-production* dapat berjalan penuh, diperlukan mekanisme yang mendorong partisipasi terstruktur, misalnya melalui program gotong royong rutin, wadah pedagang resmi, atau forum komunikasi antara pemerintah, komunitas, dan swasta.

Peran Aktor Kunci (Pemerintah dan Swasta) dalam Pengelolaan Ruang Publik Danau OPI

Peran pemerintah dan sektor swasta membentuk bagaimana ruang publik dikelola dalam kerangka *Co-production*. Ostrom menyatakan bahwa keberhasilan layanan publik bergantung pada interaksi dan kolaborasi antara publik dan sistem tata kelola, sementara (Brandsen & Pestoff, 2006) mengembangkan ide-ide ini melalui dimensi *Co-design*, *Co-delivery*, dan *Co-assessment*. Dalam kasus Danau OPI, data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur masih dominan, dan untuk pengelolaan sumber

daya yang berkelanjutan jangka panjang, tidak melibatkan warga dan sektor swasta.

Di pihak pemerintah, pengembangan Danau OPI adalah pendekatan bertahap, seperti yang diungkapkan oleh seorang petugas parkir. Ia mengatakan bahwa pekerjaan dimulai sekitar tiga tahun yang lalu, dimulai dengan pemasangan pagar, dan tahun berikutnya diselesaikan dengan pemasangan ubin. Namun, beberapa fasilitas masih tampak setengah jadi. Misalnya, penyediaan pencahayaan hanya berfungsi di bagian depan dan belakang dan lampu di taman sebagian besar bohlamnya mati, sedangkan pencahayaan taman hampir sepenuhnya gelap. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tetap terbatas pada infrastruktur fisik dengan sedikit atau tanpa manajemen keseluruhan dari fasilitas yang ada.

Peran pemerintah dalam menyediakan regulasi atau kebijakan yang jelas pun belum sepenuhnya terlihat. Pedagang menuturkan bahwa mereka berjualan tanpa izin resmi, hanya “saling ngerti” untuk tidak mengganggu lalu lintas. Ketidadaan aturan formal ini menandakan lemahnya fungsi regulasi pemerintah, sekaligus membuka ruang bagi aktivitas ekonomi informal yang kurang tertata. Padahal, jika ada kebijakan yang mengatur lokasi khusus pedagang, maka keberadaan mereka dapat menjadi bagian dari ekosistem ruang publik yang mendukung aktivitas pengunjung.

Peran pihak swasta dalam pengelolaan Danau OPI pun hampir tidak terlihat. Tidak ada informasi mengenai keterlibatan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau kemitraan lain. Padahal, ruang publik memiliki potensi besar untuk menarik sponsor swasta, baik dalam bentuk dukungan fasilitas (area bermain, kantin, penerangan), maupun kegiatan sosial-budaya. Minimnya keterlibatan swasta ini menunjukkan bahwa pemerintah belum membuka ruang kolaborasi yang luas, atau belum ada inisiatif dari pihak swasta untuk menjadikan Danau OPI sebagai bagian dari investasi sosial mereka. Padahal, pengelolaan ruang publik yang melibatkan

aktor pemerintah, masyarakat, dan swasta secara simultan sebagaimana konsep *triple helix* terbukti mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ruang publik (Mauluddin, 2018).

Keberadaan aktor masyarakat seperti pedagang dan tukang parkir juga menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi dengan aktor formal. Misalnya tukang parkir yang bekerja secara mandiri dan tanpa dukungan formal dari pemerintah, jadi penghasilan mereka bergantung pada seberapa banyak pengunjung membayar. Ini menunjukkan pengelolaan yang tidak sepenuhnya bersifat kolaboratif, tetapi lebih kepada mekanisme informal yang bersifat sepele. Peran aktor kunci dalam pengelolaan Danau OPI terlihat tidak terintegrasi. Pengelola pemerintah lebih pada pembangunan fisik dan kurang dalam hal pemeliharaan, regulasi, serta pengelola swasta yang masih sedikit terlibat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmah (2022) yang menunjukkan bahwa banyak ruang publik di daerah belum didukung oleh sistem pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini membuat kerjasama pada berbagai aspek menjadi lemah. Untuk itu, pengelolaan ruang publik Danau OPI perlu melibatkan berbagai aktif aktor kunci.

Model *Co-Production* Ideal untuk Pengelolaan Ruang Publik Danau OPI

Hasil temuan lapangan mengenai kondisi ruang publik, partisipasi masyarakat, dan peran aktor kunci menunjukkan bahwa pengelolaan Danau OPI masih menghadapi sejumlah tantangan. Walaupun demikian, harapan dan masukan dari wawancara dengan pedagang, pengelola parkir, dan pengunjung, dapat dicatat sebagai bahan untuk menyusun model *Co-production* ideal. Ini penting, karena efektivitas layanan publik sangat ditentukan dari kolaborasi masyarakat dan komunitas, bersama para aktor lainnya, di seluruh tahap *Co-design*, *Co-delivery*, dan *Co-assessment*.

Dalam kerangka *Co-design*, masyarakat menilai perlu adanya

penambahan fasilitas seperti area bermain, kantin makanan, tempat berteduh, dan penanaman pohon untuk meningkatkan kenyamanan. Pedagang juga menginginkan adanya lokasi khusus yang dapat menjadi tempat berjualan tetap, sehingga tidak perlu berpindah-pindah dan mengganggu lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya aspirasi nyata dari masyarakat untuk ikut merancang fasilitas ruang publik sesuai kebutuhan mereka. Jika pemerintah membuka forum konsultasi publik, maka aspirasi ini dapat diserap menjadi kebijakan yang lebih inklusif.

Pada tahap *Co-delivery*, masyarakat sebenarnya sudah turut serta dalam memberikan layanan, meskipun secara informal. Tukang parkir, misalnya, berperan dalam menjaga keamanan kendaraan dan ketertiban lalu lintas. Pedagang juga menyediakan kebutuhan konsumsi bagi pengunjung. Namun, tanpa kerangka kelembagaan yang jelas, kontribusi ini berjalan sporadis dan tidak terintegrasi dengan pengelolaan resmi. Model idealnya adalah membentuk kemitraan formal, di mana pedagang mendapat izin resmi, tukang parkir masuk ke dalam sistem pengelolaan, dan pengunjung difasilitasi untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan seperti kerja bakti atau program kebersihan bersama.

Sementara itu, pada dimensi *Co-assessment*, pengunjung telah memberikan evaluasi spontan mengenai kekurangan ruang publik, seperti masalah kebersihan, penerangan, dan minimnya fasilitas. Namun, evaluasi ini belum pernah dikumpulkan secara sistematis. Model ideal yang dapat dikembangkan adalah membentuk forum komunikasi masyarakat dan pemerintah yang bertugas mengawasi kualitas ruang publik, menampung keluhan, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, model *Co-production* ideal bagi Danau OPI dapat digambarkan sebagai kolaborasi sinergis antara pemerintah yang menyediakan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat yang berkontribusi dalam pemeliharaan dan evaluasi, pedagang serta tukang parkir

yang berperan dalam layanan tambahan, serta swasta yang mendukung melalui program CSR untuk melengkapi fasilitas. Jika model ini dapat dijalankan, maka Danau OPI tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menjadi hasil produksi bersama seluruh pemangku kepentingan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang telah menyediakan fasilitas dasar seperti jalur *jogging*, tempat duduk, aksesibilitas, dan area parkir yang dianggap memadai oleh sebagian besar pengunjung. Namun, kualitas fasilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti kebersihan yang kurang terjaga, penerangan yang tidak merata, minimnya vegetasi peneduh, serta belum tersedianya fasilitas pendukung seperti kantin dan area bermain anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengembangan ruang publik masih terbatas pada penyediaan infrastruktur dasar tanpa pengelolaan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik juga masih tergolong rendah. Keterlibatan pengunjung hanya sebatas pemanfaatan fasilitas, sementara pedagang dan petugas parkir berkontribusi secara informal tanpa adanya wadah partisipasi yang terstruktur. Minimnya forum komunikasi, kegiatan gotong-royong, maupun mekanisme penyampaian aspirasi menunjukkan bahwa dimensi *Co-delivery* dan *Co-assessment* belum berjalan optimal. Masyarakat memiliki potensi untuk terlibat lebih jauh, namun belum difasilitasi oleh pemerintah melalui regulasi atau program kolaboratif yang jelas.

Peran pemerintah terlihat dominan pada tahap pembangunan fisik, tetapi belum kuat pada aspek pengelolaan, penataan pedagang, pengaturan aktivitas ekonomi, maupun pemeliharaan fasilitas. Di sisi lain, peran swasta hampir tidak ditemukan, baik melalui kemitraan maupun dukungan CSR. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan ruang

publik belum sepenuhnya melibatkan aktor-aktor kunci secara sinergis sebagaimana prinsip *Co-production* yang diusulkan oleh Ostrom serta Brandsen & Pestoff.

Berdasarkan temuan tersebut, model *Co-production* ideal bagi Danau OPI menekankan perlunya kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah, masyarakat, pedagang, petugas parkir, dan sektor swasta. Pemerintah perlu membuka ruang konsultasi publik, menyediakan regulasi yang jelas, dan membentuk mekanisme partisipatif seperti forum komunitas atau program pemeliharaan bersama. Dengan keterlibatan aktor yang lebih seimbang di tahap *Co-design*, *Co-delivery*, dan *Co-assessment*, Danau OPI berpotensi berkembang menjadi ruang publik yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Brandsen, T., & Pestoff, V. A. (Eds.). (2008). *Co-production: The third sector and the delivery of public services*. Routledge.
- Gehl, J., & Svarre, B. (2013). *How to study public life* (Vol. 2). Washington, DC: Island press.
- Kuta, D. (2025). Public Space in the Context of Urban Planning and Sustainable Urban Development. *Engineering Proceedings*, 116(1), 9.
- Ling, L. M., & Fahmi, E. (2020). Co-Production: Studi Tentang Pola-Pola Penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Di Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 4(1), 11-22.
- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Diagnosing and remedying the failings of official participation schemes: The CLEAR framework. *Social policy and Society*, 5(2), 281-291.
- Mauluddin, A. (2018). Collaboration of Triple Helix Actors in The Production of Public Space: The Tematic Park In Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(2), 51-61.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World development*, 24(6), 1073-1087.
- Qi, J., Mazumdar, S. & VasConcelos, A.C. Understanding the Relationship between Urban Public Space and Social Cohesion: A Systematic Review. *Int. Journal of Com. WB* 7, 155–212 (2024). <https://doi.org/10.1007/s42413-024-00204-5>
- Rahmiati, D., & Prihastomo, B. (2018). Identifikasi Penerapan Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pada Taman Kambang Iwak Palembang. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*, 8(1), 29-42.
- Rohmah, E. N. L. (2022). Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan). *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 46-54.
- Sari, L. P., Zetra, A., & Valentina, T. R. (2021). Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Pasrtisipasi Politik Di Nagari Talang Anau. *Jurnal Niara*, 13(2), 11-22.
- Sukmayeti, E., & Utami, V. Y. (2018). Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(2), 12-135.
- Supriyanto, J., Ragiliawan, Z., & Rohmah, W. (2023). *Pengaruh kebijakan penataan ruang terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Surakarta*. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 144–159. penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif).

- Verschuere, B., Brandsen, T., & Pestoff, V. (2012). Co-production: The state of the art in research and the future agenda. *Voluntas: international journal of voluntary and nonprofit organizations*, 23(4), 1083-1101.
- Yulianti, D., & Junaidi, H. (2021). Evaluasi Manajemen Tata Ruang Wisata Dan Ruang Terbuka untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Dan Pad Kota Palembang. *Jurnal Tekno Global*, 10(2).